



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH RIAU  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Jl. Yos Sudarso No.2 28814  
Telp. (0765)-31280

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan KaruniaNya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai Tahun 2021 dan hubungannya dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Secara detail Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 merupakan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan capaian sasaran sehingga menggambarkan kinerja yang telah dilakukan dan sejauh mana efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana, sumber daya manusia, sarana pendukung lainnya berikut nilai capaian output dan outcomenya.

Suatu tata pemerintah yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perwujudan penerapan kedua prinsip tersebut Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai telah menerapkan sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Kinerja sebagai cermin kinerja yang diwujudkan pada satu tahun tertentu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyajikan data capaian kinerja yang telah diwujudkan selama Tahun 2021 yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi disamping juga mencatat beberapa ketidakberhasilan.

Di masa mendatang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai pada khususnya dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada umumnya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja dimasa mendatang.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Dan Profil Kantor Imigrasi Dumai.....	1
B. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai .....	3
C. Struktur Organisasi .....	5
D. Dasar Hukum Pelaksanaan LAKIP .....	13
E. Permasalahah Utama ( <i>Strategic Issued</i> ).....	13
<b>BAB II Visi, Misi, Nilai, Tujuan, Sasaran Strategis, Tugas dan Fungsi .....</b>	<b>16</b>
A. Visi, Misi, Nilai, Tujuan dan Sasaran Strategis .....	16
B. Perjanjian Kinerja.....	21
<b>BAB III TARGET KINERJA ORGANISASI DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>23</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	23
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	33
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
Lampiran. ....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam perwujudan *Good Governance*, pemerintah diuntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *Good Governance*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *Good Governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *Good Governance* dalam acuan umum penerapan *Good Governance* pada sektor publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggung jawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

#### **Latar Belakang Dan Profil Kantor Imigrasi Dumai**

Kantor Imigrasi Dumai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet No. Aa/C/125/1965, tanggal 13 November 1965, sebelum SK tersebut diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas II Dumai merupakan kantor cabang dari Kantor Imigrasi Bengkalis, dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.M./27/12, tanggal 22 September 1958 Kantor Cabang Imigrasi Bengkalis di Dumai hanya merupakan pelabuhan pendaratan, khususnya untuk pelayanan dan pengawasan keimigrasian bagi kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak mentah, dengan semakin meningkatnya kegiatan keimigrasian, dan semakin berkembangnya kota Dumai, maka terbitlah Surat Keputusan Presidium kabinet tersebut diatas.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Dumai sampai pada tanggal 18 Maret 2018 meliputi 7 Kecamatan di Kota Dumai yaitu : Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Selatan, Lubuk Gaung, Bukit Kapur, Medang Kampai, dan ditambah dengan beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yaitu : Pulau Rupa (Kec. Rupa dan Kec. Rupa Utara), Kecamatan Pinggir, Kecamatan Mandau, dan Bathin Solapan. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04. Tahun 1991 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2016 tentang perubahan keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Namun terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018, Pembagian Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Khusus Medan, Kerja Kantor Imigrasi Khusus Jakarta Barat, Kerja Kantor Imigrasi Polonia, Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara, Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan, Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Dumai, Kerja Kantor Imigrasi Tanjung Redeb wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Dumai mengalami perubahan menjadi 7 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Dumai Barat, dengan kelurahan :
  - Bagan Keladi
  - Pangkalan Sesai
  - Purnama
  - Simpang Tetap Darul Ichsan .
2. Kecamatan Dumai Timur, dengan kelurahan :
  - Bukit Batrem
  - Buluh Kasap
  - Jaya Mukti
  - Tanjung Palas
  - Teluk Binjai .
3. Kecamatan Bukit Kapur, dengan kelurahan :
  - Bagan Besar
  - Bukit Kayu Kapur
  - Bukit Nenas
  - Gurun Panjang
  - Kampung Baru.
4. Kecamatan Medang Kampai, dengan kelurahan :
  - Guntung
  - Mundam
- Teluk Makmur
- Pelintung
5. Kecamatan Sungai Sembilan, dengan kelurahan :
  - Bangsal Aceh
  - Basilam Baru
  - Batu Teritip
  - Lubuk Gaung
  - Tanjung Penyembal
6. Kecamatan Dumai Kota, dengan kelurahan:
  - Laksamana
  - Rimba Sekampung
  - Bintan
  - Dumai Kota
  - Sukajadi
7. Kecamatan Dumai Selatan, dengan kelurahan :
  - Bukit Timah
  - Mekar Sari
  - Bumi Ayu
  - Ratu Sima
  - Bukit Datuk

## **B. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai**

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan suatu hubungan diantara pejabat maupun bidang satu dengan lainnya, sehingga jelas kedudukan, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dalam suatu kedudukan yang teratur. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dapat dijelaskan fungsi dan tugas masing-masing bagian di Kantor Imigrasi Kelas II Dumai yaitu sebagai berikut :

### **B.1 Sub Bagian Tata Usaha**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tatausaha dan rumah tangga Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai sub bagian tata usaha.

#### **➤ Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :**

1. Kepala Urusan Kepegawaian  
Melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepala Urusan Umum  
Melakukan urusan surat menyurat perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepala Urusan Keuangan  
Melakukan urusan keuangan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B.2 Seksi Lalulintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian**

Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas-tugas melakukan kegiatan Keimigrasian di lalu lintas Keimigrasian dibagi menjadi dua bagian yaitu:

#### **➤ Kasubsi Lalulintas Keimigrasian**

Sub Seksi Lalulintas Keimigrasian mempunyai tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Melakukan pemberian izin masuk / keluar dan fasilitas keimigrasian.
- b. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali

Tugas :

- a. Melakukan urusan perizinan di bidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan antara Negara Republik Indonesia dan Negara lain berdasarkan peraturan dan atau perjanjian lintas batas yang berlaku.
- b. Melakukan urusan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat, dan izin kembali

sesuai dengan Aplikasi SPRI.

#### ➤ **Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian**

Seksi Statuskim mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan status keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Statuskim mempunyai fungsi:

1. Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia.
2. Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya.
3. Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian.
4. Sub Seksi penelaahan Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan kewarganegaraan.

### **B.3 Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Dumai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas seksi ini mempunyai fungsi :

1. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perijinan Keimigrasian dan mengadakan Kerjasama antar instansi di bidang Pengawasan Orang Asing.
2. Melakukan Penyidikan dan Penindakan terhadap pelanggaran Keimigrasian.
3. Menyusun, memelihara dan mengamankan daftar pencegahan dan penangkalan.
4. Melakukan penyidikan pelanggaran keimigrasian dalam rangka Projustitia.
5. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian.
6. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam Pengawasan Orang Asing (TIM PORA).
7. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan.

Seksi Intelijen dan penindakan keimigrasian terdiri dari dua sub seksi yaitu :

#### ➤ **Sub Seksi Intelijen Keimigrasian**

Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar Instansi tentang Pengawasan Orang Asing.

➤ **Sub Seksi Penindakan Keimigrasian**

Melakukan tugas Penyidikan dan Penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggaran keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**B.4 Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemantauan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi Keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Dumai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Insarkom mempunyai fungsi :

1. Melakukan pengumpulan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan Keimigrasian
2. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen Keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

Seksi Intelijen dan penindakan keimigrasian terdiri dari dua kasubsi yaitu :

1. Kasubsi Teknologi Informasi yaitu melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai WNI dan WNA dalam rangka kerjasama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian.
2. Kasubsi Teknologi Komunikasi yaitu melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta penggunaan dan pemeliharaan sarana komunikasi.

**C. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI TPI Dumai sebagai berikut :

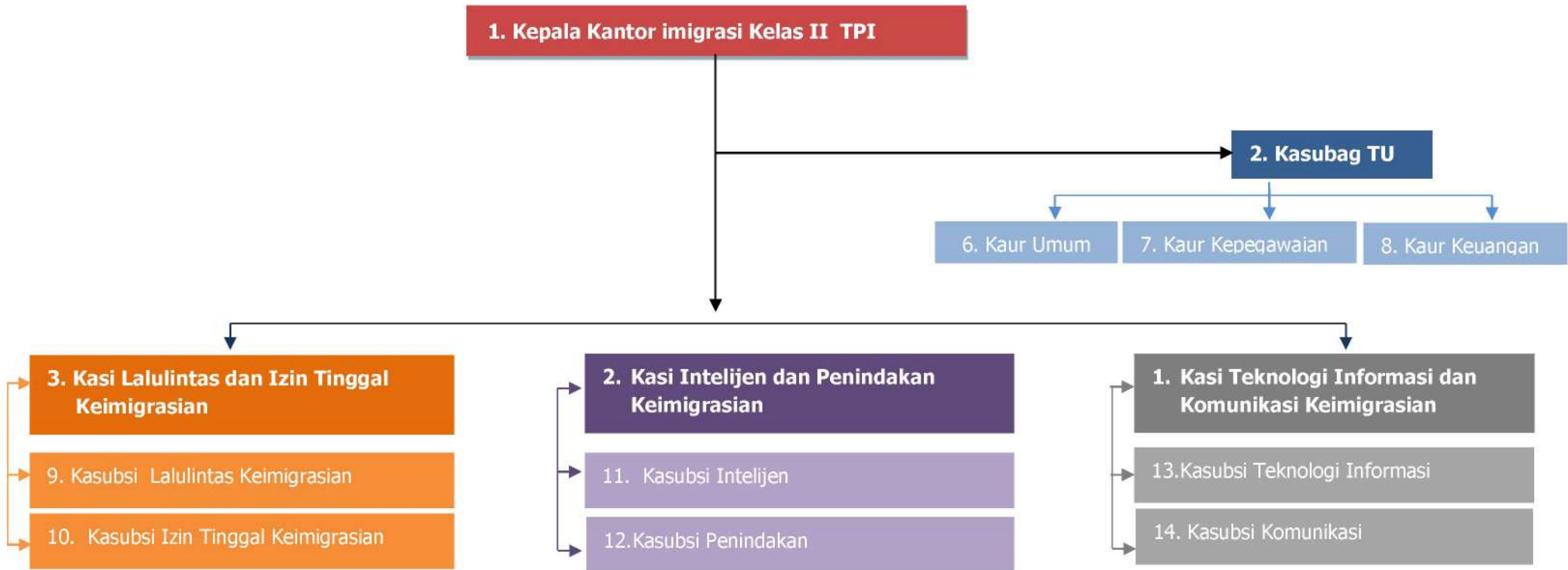
- a. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - o Urusan Kepegawaian
  - o Urusan Umum;
  - o Urusan Keuangan.
- b. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, membawahi :
  - o Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian;
  - o Sub Seksi Komunikasi Keimigrasian.
- c. Seksi Lalulintas dan Izin Keimigrasian, membawahi :



- Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
  - Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian.
- d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, membawahi :
- Sub Seksi Intelijen Keimigrasian;
  - Sub Seksi Penindakan Keimigrasian.

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan suatu hubungan diantara pejabat maupun bidang satu dengan lainnya, sehingga jelas kedudukan, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dalam suatu kedudukan yang teratur. Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dapat dijelaskan fungsi dan tugas masing-masing bagian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai yaitu sebagai berikut;

## Bagan Struktur Organisasi



### Keterangan :

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Dumai                 | : Rejeki Putra Ginting, S.H., M.Hum |
| 2. Kasubag TU  | : Soegiyanto, S.H                   |
| 3. Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian        | : Boyke Panggabean S.H              |
| 4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian           | : Dodi Inamullah, S.H               |
| 5. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian | : Parizal Ham, S.H                  |

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 6. Kaur Umum                                 | : Rasiman Situmorang, S.Kom |
| 7. Kaur Kepegawaian                          | : Endang Fitriyanti, S.Sos  |
| 8. Kaur Keuangan                             | : Zul Efendi, S.H           |
| 9. Kasubsi Lalulintas Keimigrasian           | : Wahyu Aditya Prabu, S.H   |
| 10. Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian        | : Eko Santoso, S.H          |
| 11. Kasubsi Intelijen Keimigrasian           | : Ryanda Pratama, S.H       |
| 12. Kasubsi Penindakan Keimigrasian          | : Suwandono, S.Kom          |
| 13. Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian | : Al-As-Ari, S.H            |
| 14. Kasubsi Komunikasi Keimigrasian          | : Feny Jendry Luis, S.H     |

### Laporan Bezetting Pegawai

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ESELON	PANGKAT/GOL	TMT	PENDIDIKAN	DIKLAT TEKNIS	DIKLAT PENUNJANG	DIKLAT LAINNYA	KETERANGAN
1	REJEKI PUTRA GINTING, S.H., M.Hum	LK	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI	III.b	PEMBINA - IV/a	8/2/2021	S2 Master Hukum	PTK XXVIII	DIKLATPIM III		
2	PARIZAL HAM, S.H.	LK	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	IV.b	PENATA Tk. I - III/d	4/1/2018	S1 Ilmu Hukum	PTK XXVII	DIKLATPIM IV		
3	DODI INAMULLAH, S.H.	LK	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	IV.b	PENATA Tk. I - III/d	01-04-2010	S1 Ilmu Hukum	PTK XXVII	DIKLATPIM IV		
4	EKO SANTOSO, S.H.	LK	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	V.a	PENATA Tk. I - III/d	01-04-2018	S1 Ilmu Hukum			PRAJABATAN	

5	SOEGIYANTO, S.H.	LK	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV.b	PENATA Tk. I - III/d	01-04-2016	S1 Ilmu Hukum			PRAJABATAN	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
6	PERWIRA, S.Sos	LK	FUNGSIONAL UMUM		PENATA TK.I - III/d	01-10-2013	S1 Ilmu Administrasi	PDKXXIV			
7	RASIMAN SITUMORANG, S.Kom	LK	FUNGSIONAL UMUM		PENATA TK.I - III/d	01-04-2017	S1 Sistem Komputer			PRAJABATAN	
8	SUWANDONO, S.Kom	LK	KASUBSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	V.a	PENATA - III/c	4/1/2019	S1 Teknik dan Ilmu Komputer	DIKSUSKIM II		PRAJABATAN	
9	ISNAWATI	PR	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA Tk.I - III/b	01-04-2005	SLTA				
10	SONTRY SYAMSAMIR	LK	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA Tk.I - III/b	01-04-2009	SLTA				
11	YEL APRIANI	PR	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA Tk.I - III/b	01-04-2012	SLTA				
12	JANUAR	LK	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA Tk.I - III/b	01-10-2015	SLTA				
13	BOYKE PANGGABEAN, S.H.	LK	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	IV.b	PENATA MUDA Tk.I - III/d	01-10-2015	S1 Ilmu Hukum	PTK XXVIII			
14	RYANDA PRATAMA, S.H.	LK	KEPALA SUB SEKSI PENGAWASAN		PENATA - III/c	01-04-2016	S1 Ilmu Hukum	PTK XXXII			
15	EKO PRASETYO PUTRANTO, S.E.	LK	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA Tk.I - III/c	01-04-2021	S1 Manajemen				
16	AL AS ARI, S.H.	LK	KEPALA SUB SEKSI TEKNOLOGI	V.a	PENATA - III/c	01-04-2019	S1 Ilmu Hukum	DIKSUSKIM II			

			INFORMASI KEIMIGRASIAN								
17	ZUL EFENDI, S.H.	LK	KEPALA URUSAN KEUANGAN		PENATA - III/c	01-04-2017	S1 Ilmu Hukum			Diklat Bendahara Pengeluaran	
18	ANINDYA RATNA PUTRI, S.H	PR	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA Tk.I - III/c	4/1/2021	D3 Administrasi Niaga				
19	RUBINTANG, S.H.	PR	BENDAHARA PENGELUARAN		PENATA - III/c	01-04-2017	S1 Ilmu Hukum			Diklat Bendahara Pengeluaran	
20	FENY JENDRY LUIS,S.H.	LK	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	V.a	PENATA MUDA Tk.I - III/b	01-10-2017	S1 Ilmu Hukum		PPNS		
21	WAHYU ADITYA PRABU , S.H.	LK	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	V.a	PENATA - III/c	01-10-2021	S1 Ilmu Hukum				
22	ENDANG FITRIYANTI, S.Sos	PR	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA Tk.I - III/b	01-04-2021	S1 Adm Negara				
23	SITI ARYATI HARAHAP,S.Kom	PR	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA - III/b	1/4/2021	S1 Komputer				
24	FEBRIANI ANWAR, A.Md.	PR	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA - III/b	01-04-2021	D III Informatika				Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
25	HENDRO YUDINATA	LK	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA - III/b	01-04-2021	D III Manajemen Informatika				

26	ANDRIAN PERDANA, S.T.	LK	ANALIS KEIMIGRASIAN		PENATA MUDA - III/a	01-12-2017	S1 Teknik Informatika			LATSAR	
27	YOGA TRI YUDISTIRA, S.E.	LK	ANALIS KEIMIGRASIAN		PENATA MUDA - III/a	01-12-2017	S1 Akuntansi			LATSAR	
28	ACHMAD REZA PUTRA, S.IP	LK	ANALIS KEIMIGRASIAN		PENATA MUDA - III/a	01-12-2017	S1 Ilmu Hubungan Internasional			LATSAR	
29	ARTARTY SIRINGIRINGO, S.I.Kom	PR	ANALIS KEIMIGRASIAN		PENATA MUDA - III/a	01-12-2017	S1 Ilmu Komunikasi			LATSAR	
30	ANGGA RIZKY PUTRA, S.T.	LK	ANALIS KEIMIGRASIAN		PENATA MUDA - III/a	01-12-2017	S1 Teknik Informatika			LATSAR	
31	DIOMENA, S.I.Kom	LK	ANALIS KEIMIGRASIAN		PENATA MUDA - III/a	01-12-2017	S1 Ilmu Komunikasi			LATSAR	
32	RIDHO KURNIAWAN, S.E.	LK	ANALIS KEIMIGRASIAN		PENATA MUDA - III/a	01-12-2017	S1 Akuntansi			LATSAR	
33	SOPIYAN, S.I.P	LK	ANALIS KEIMIGRASIAN		PENATA MUDA - III/a	01-12-2017	S1 Ilmu Politik			LATSAR	
34	LASMA YULIANTI N ,S.Psi	PR	ANALIS KEIMIGRASIAN		PENATA MUDA - III/a	01-12-2017	S1 Psikologi			LATSAR	
35	YUDI FERDIAN, A.Md	LK	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA - III/a	01-04-2019	D III Manajemen Informatika				
36	LAWRY SOFI LAMRISNA PURBA	PR	FUNGSIONAL UMUM		PENGATUR Tk.I - II/d	01-10-2015	SLTA				
37	NURJASMITA. M, A.Md.	PR	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA - III/a	01-04-2016	D III Manajemen Informatika				
38	DAMERIA SIREGAR	PR	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA - III/a	01-04-2021	SLTA				

39	MUHAMMAD HAFIS	LK	FUNGSIONAL UMUM		PENGATUR Tk.I -II/d	01-04-2019	SLTA					
40	SAUT MARULI,A.Md	LK	FUNGSIONAL UMUM		PENGATUR II/d	01-04-2019	D3 Administrasi Niaga				Diklat Bendahara Pengeluaran	
41	OSTARINDO SIAHAAN	LK	CPNS		PENGATUR MUDA - II/a	01-12-2021	SLTA					
42	M. FERDIANSYAH AL BUSRA BIBRA	LK	CPNS		PENGATUR MUDA - II/a	01-12-2021	SLTA					
43	CHRISTOFEL MANAEK NADEAK	L	FUNGSIONAL UMUM		PENATA MUDA - III/a	01-04-2019	D3 Management Informatika				Diklat Bendahara Pengeluaran	

### Rekapitulasi Pegawai

NO	GOLONGAN	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL		NON STRUKTURAL	
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	IV	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	III	13	9	8	7	11	0	2	1	13	1	14	9
3	II	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	1
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>10</b>

#### D. Dasar Hukum Pelaksanaan Lakip (Akuntabilitas Kinerja Instansipemerintah)

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKIP antara lain :

1. Perpres Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I kementerian negara;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 – 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

#### E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Pada Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

Sub Bagian / Seksi	Permasalahan	Kesimpulan
<b>Sub Bagian Tata Usaha</b> ➤ Kaur Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya ruangan untuk tempat penyimpanan BMN dan penyimpanan Arsip Fasilitatif.</li><li>• Penatalaksanaan BMN</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengajukan usul penghapusan barang inventaris dan mengusulkan kendaraan penggantian</li><li>• Melakukan perawatan dengan biaya pemeliharaan yang tersedia</li><li>• Selalu melakukan koordinasi terhadap instansi terkait seperti Kanwil, KPKNL dan Direktorat</li></ul>
➤ Kaur Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan koordinasi ke Biro Keuangan</li></ul>



<p>➤ Kaur Kepegawaian</p>	<p>karena Maksimal Pencairan PNBP dibatasi pada setiap pencairannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapatnya kekurangan jumlah pegawai di bidang jabatan fungsional umum</li> <li>• Aplikasi simpeg yang sering bermasalah jika ada mutasi pejabat yang masuk dan keluar</li> <li>• Terjadinya kendala dalam usul kenaikan pangkat dengan di aplikasi simpeg</li> </ul>	<p>Sekjen, dengan mengirimkan surat mengenai Hal tersebut untuk ditindaklanjuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil</li> </ul>
<p><b>Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya jumlah SDM</li> <li>• Kurangnya fasilitas pendukung seperti AC dan kasur untuk istirahat petugas TPI di office TPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu penambahan SDM</li> <li>• Perlu penambahan perangkat komputer baru</li> <li>• Penambahan both prioritas</li> <li>• Penambahan garis antrian</li> <li>• Pembuatan petunjuk arah loket bagi pemohon</li> </ul>
<p><b>Seksi Teknologi Informasi dan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya PC/ laptop yang memiliki spesifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan peralatan pendukung kehumasan</li> </ul>

<p><b>Komunikasi Keimigrasian</b></p>	<p>memadai untuk editing foto dan video</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai WBS atau aplikasi LAPOR</li> <li>• Penyajian informasi keimigrasian yang kurang efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambah PC/Laptop yang memiliki spesifikasi yang memadai</li> <li>• Melakukan sosialisasi dengan target langsung kepada masyarakat</li> <li>• Membuat penyajian informasi yang lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat</li> </ul>
<p><b>Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan SDM dalam kegiatan lapangan khusus di bagian intelijen/pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kekurangan SDM pegawai bertugas secara bergantian</li> <li>• Menyewa alat transportasi sesuai kebutuhan</li> <li>• Dalam pengawasan untuk sementara mengandalkan informasi dari informan untuk data dukung (alat bukti lapangan)</li> </ul>

**BAB II**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS**  
**SERTA TUGAS DAN FUNGSI**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II DUMAI**

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai memberikan indikasi terhadap situasi yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi yang meliputi pelayanan, penegakan hukum, keamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Fungsi keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan Komunikasi yang modern, serta memerlukan bentuk struktur organisasi yang inovatif dan responsif dalam menanggapi tuntutan globalisasi.

Berkembang dan meningkatnya kejahatan internasional serta kejahatan transnational, seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba dan pencucian uang. Direktorat Jenderal Imigrasi harus respon kondisi ini dengan membangun dan mengembangkan SIMKIM secara bertahap dan berkesinambungan dalam mendukung pelaksanaan fungsi keimigrasian. Disamping itu dengan adanya kemudahan perlintasan orang antar negara menjadikan batas-batas antar negara tidak terlihat dengan jelas (*borderless society*).

Ketergantungan ekonomi antar negara mendorong arus orang dan investasi bergerak antar negara. Hal ini menjadikan fungsi keimigrasian yang lebih berpihak kepada kebijakan fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat strategis. Kebijakan keimigrasian yang responsif harus selaras dengan program pembangunan nasional yang berkesinambungan.

**A. Visi, Misi, Nilai, Tujuan, Sasaran Strategis, Tugas Dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Dumai**

**A.1 VISI**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian perlu diberikan gambaran dan perwujudan organisasi yang ideal dan realistis pada masa depan yang menjadi visi organisasi yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Visi yang ditetapkan diselaraskan dengan visi Kementerian Hukum dan HAM agar dapat mendukung pencapaian kinerja dalam lingkup Kementerian. Visi Kantor Imigrasi Kelas II Dumai dirumuskan sebagai berikut:

**“Masyarakat Memperoleh Kepastian Pelayanan dan Penegakan  
Hukum Keimigrasian.”**

Rumusan tersebut mengedepankan fungsi pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, dengan pertimbangan bahwa fungsi tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi. Fungsi keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari fungsi keimigrasian yang dalam pencapaiannya bersinergi dengan fungsi urusan pemerintahan lainnya. Rumusan visi tersebut mempunyai 2 (dua) kata kunci yang memiliki arti:

Pertama, Kepastian Pelayanan. Sebagai institusi yang mempunyai fungsi dalam pelayanan, Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas, yakni pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, terukur dari segi waktu, biaya dan kepastian persyaratan serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbasis teknologi informasi.

Kedua, Penegakan Hukum Keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian yang tegas, profesional, dan tidak diskriminatif yang didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian akan mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia, Orang Asing dan Penjamin serta memberikan rasa aman, rasa adil dan berdampak positif terhadap stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kepastian pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, seluruh unit kerja di jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Dumai harus bekerja secara maksimal dengan menjabarkannya ke dalam misi, tujuan, sasaran serta nilai-nilai luhur yang menyatu dalam pencapaian visi.

## **A.2 MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai Kantor Imigrasi Kelas II Dumai pada masa mendatang yang penjabarannya dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi.

Dalam menetapkan misi yang berperan strategik dalam mencapai visi. Dalam kurun waktu 2020-2024 mendatang rumusan misi yang didasarkan pada fungsi keimigrasian yang meliputi:

1. Memperkuat penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel.  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berupaya secara konsisten melaksanakan penegakan hukum keimigrasian secara adil dan akuntabel.
2. Mendukung terciptanya keamanan negara yang stabil.  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai meningkatkan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian terhadap orang yang keluar, masuk dan keberadaannya di Wilayah Indonesia dalam rangka turut serta menjaga keamanan negara.

3. Meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai sebagai institusi pelayanan publik senantiasa berinovasi meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima.

4. Mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berperan menjadi fasilitator dalam menunjang pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan/kebijakan keimigrasian.

### A.3 NILAI-NILAI

Nilai-nilai yang ditanamkan terhadap setiap insan imigrasi merupakan nilai-nilai luhur yang mengakar dalam jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai yang terwujud pada suatu kebiasaan, kepercayaan, karakteristik dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian. Nilai-nilai tersebut meliputi :

1. Taqwa.

Mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap Insan Imigrasi harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghindari apa yang menjadi larangan-Nya.

2. Menjunjung Tinggi Kehormatan.

Mengandung pengertian bahwa setiap Insan Imigrasi harus menjaga citra serta memelihara kehormatan diri dan institusi secara konsisten dan konsekuen.

3. Cendekia.

Mengandung pengertian bahwa sebagai penjaga pintu gerbang negara dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan setiap Insan Imigrasi dituntut untuk dapat menjadi individu yang cerdas, pandai dan bijaksana.

4. Integritas pribadi.

Mengandung pengertian bahwa setiap Insan Imigrasi harus tangguh dan mampu menjaga kehormatan dan kewibawaan dalam menjalankan tugas.

5. Inovasi.

Mengandung pengertian bahwa dalam pencapaian visi dan misi banyak tantangan dan hambatan yang akan dilalui karenanya setiap Insan Imigrasi harus mampu melihat situasi dan kondisi saat ini dan yang akan datang dengan mencari solusi yang tepat dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan nilai organisasi “ semakin PASTI” yang tertanam pada Kantor Imigrasi Kelas II Dumai terdiri dari :

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk

mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreavitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### A.4 Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dari penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan yang akan dicapai pada periode 2020-2024, yaitu:

1. Terwujudnya kepastian penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel.
2. Terwujudnya penguatan fungsi keimigrasian dalam menunjang keamanan negara yang stabil.
3. Terwujudnya pelayanan keimigrasian yang prima.
4. Terwujudnya peraturan perundang-undangan/kebijakan keimigrasian yang menunjang pencapaian pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

## A.5 Sasaran Strategi

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran (*outcome/impact*) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa kegiatan. Sasaran yang akan diwujudkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai, yaitu:

1. Kebijakan dalam bidang penegakan hukum keimigrasian, sasarannya adalah:
  - a. Menurunnya pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian;
  - b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum di bidang keimigrasian.
2. Kebijakan dalam bidang keamanan negara, sasarannya adalah:
  - a. Mengurangi terjadinya pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang mengganggu keamanan negara;
  - b. Mengurangi kerawanan keamanan perlintasan orang keluar dan masuk wilayah Indonesia serta pengawasannya;
  - c. Mengurangi ancaman kejahatan transnasional yang mengganggu keamanan negara;
  - d. Meningkatnya peran aktif imigrasi untuk ikut serta menjaga keamanan negara.
3. Kebijakan dalam bidang pelayanan keimigrasian, sasarannya adalah:
  - a. Meningkatnya pelayanan keimigrasian yang aman, cepat, mudah, terpadu dan akuntabel yang berbasis teknologi informasi dan Komunikasi;
  - b. Meningkatnya pelayanan keimigrasian yang semakin dekat kepada masyarakat;
  - c. Meningkatnya PNBP Keimigrasian.
4. Kebijakan dalam bidang fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, sasarannya adalah:
  - a. Meningkatnya peraturan perundang-undangan/kebijakan keimigrasian yang mendukung investasi dan kepariwisataan;
  - b. Meningkatnya sarana dan prasarana keimigrasian yang didukung dengan meningkatnya PNBP keimigrasian;
  - c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM untuk berpartisipasi dalam kerangka kerjasama keimigrasian yang berskala nasional dan internasional.

## A.6 Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun 2021, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA P	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15 Indeks
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.	Nilai Reformasi Birokrasi Nilai Akuntabilitas	82% 88%

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15 Indeks
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dengan mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"  Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%  92%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERAJA
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks	3,97 Indeks



		ii. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 Indeks	3,88 Indeks
		iii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks	3,98 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp 1.796.455.000</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.796.455.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>5.503.646.000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	5.503.646.000

## A.7 Tugas dan Fungsi

### Tugas

- Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam bidang keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

### Fungsi

- Melakukan pelayanan dalam bidang keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

**BAB III**  
**TARGET KINERJA ORGANISASI**  
**DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Untuk Tahun 2021 terdapat beberapa pencapaian kinerja, berikut indikator kerjanya,

Capaian kinerja pada setiap tahunnya disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Nomor : DS:0206-9790-2016-9204 tanggal 12 November 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) untuk Satuan Kerja (Satker) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai Tahun Anggaran 2021 yang bersumber pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM, bentuk kegiatannya adalah :

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian **Rp. 7.021.012.000,-**

Sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 699.298.000,-
2. Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Rp. 896.652.000,-
3. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Rp. 149.370.000,-
4. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 453.000.000,-
5. Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp. 834.766.000,-
6. Layanan Perkantoran	Rp. 3.987.926.000,-

**Jumlah** **Rp. 7.021.012.000,-**

**Prosentase & Nominal Capaian Hasil Pelaksanaan setelah ada penambahan dari revisi pagu minus belanja pegawai**

Pagu	Realisasi	Persentase%	Sisa
Rp. 7,870,339,000	Rp 6,931,628,225	88.07%	Rp. 938,710,775

## A.1 Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Dumai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas, seksi ini mempunyai fungsi dan tugas :

1. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perijinan Keimigrasian dan mengadakan Kerjasama antar instansi di bidang Pengawasan Orang Asing.
2. Melakukan Penyidikan dan Penindakan terhadap pelanggaran Keimigrasian.
3. Menyusun, memelihara dan mengamankan daftar pencegahan dan penangkalan.
4. Melakukan penyidikan pelanggaran keimigrasian dalam rangka Projustitia.
5. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian.
6. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam Pengawasan Orang Asing (TIM PORA).
7. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan.

Upaya meningkatkan pengawasan juga dilakukan melalui media (Website). Website ini berfungsi untuk menyampaikan himbauan dan memberdayakan masyarakat dalam melakukan pengawasan Orang Asing yang mencurigakan sehingga dapat langsung melaporkan melalui sms pada Aplikasi Pengawasan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas II Dumai.

Berikut adalah Data Rekapitulasi Kegiatan dan Tindakan Keimigrasian Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian tahun 2021

**Data Rekapitulasi Kegiatan Seksi Intelijen dan Penindakan Tahun 2021**

Bulan	Epo Waskat	Epo Deportasi	BAP SPRI Rusak /Hilang	Terkarantina	Operasi Lapangan
Januari	-	-	2	-	4
Februari	-	-	0	-	3
Maret	-	-	3	-	2
April	-	-	1	-	2
Mei	-	-	0	-	2
Juni	-	-	2	-	4
Juli	-	-	2	-	1
Agustus	-	-	1	-	4
September	-	-	1	-	4
Oktober	-	-	0	-	4
November	-	-	2	-	1
Desember	-	-	1	-	2
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

## **A.2 Seksi Lalulintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian**

### **A.2.a Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian.**

Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas-tugas melakukan kegiatan Keimigrasian di lalu lintas Keimigrasian dibagi menjadi dua bagian yaitu :

#### **4.2.1 Sub Seksi Lalulintas Keimigrasian**

Sub Seksi Lalulintas Keimigrasian mempunyai tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- b. Melakukan pemberian izin masuk / keluar pada TPI di pelabuhan.
- c. Melakukan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) bagi Warga Negara Asing (WNI)
- d. Melakukan *Clearance* pada crew kapal barang non ferry.

Tugas :

- a. Memberikan perizinan di bidang lintas batas antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain berdasarkan peraturan dan perjanjian lintas batas yang berlaku.
- b. Melakukan pemberian DPRI sesuai dengan aplikasi.
- c. Menolak permohonan pada calon TKI Non Prosedural.
- d. Mencegah keberangkatan pada calon TKI Non Prosedural di perbatasan laut.

#### **4.2.2 Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian**

Seksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai fungsi:

- i. Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia.
- ii. Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya.
- iii. Melakukan penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian.
- iv. Memberikan izin tinggal bagi WNA yang tinggal / berkegiatan di wilayah tugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai.

### **A.2.b Pelayanan Penerbitan DPRI**

- Terjalin kerjasama antara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai dengan Kantor Pos Indonesia Nomor : W4.IMI.IMI.4.UM.01.01-2045 tanggal 03 Desember 2019 tentang

Pelayanan Pengiriman Paspor dan Penyetoran Pembayaran Paspor Menggunakan Layanan Pos.

- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai melayani permohonan DPRI melalui Sistem Antrian Paspor Online (Apapo).
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai juga melayani permohonan DPRI dengan standar pelayanan SOP *One Stop Service* (OSS) dimana pemohon datang langsung dan dilayani oleh petugas *Costumer Care* sesuai dengan persyaratan.
- Setelah memenuhi persyaratan petugas memberikan nomor antrian untuk menunggu di proses scan data, pengambilan foto, sidik jari, dan wawancara singkat, setelah di nyatakan memenuhi persyaratan di berikan pengantar untuk pembayaran SPRI ke bank dan Kantor Pos.
- Pengambilan Paspor 3 (tiga) hari kerja di hitung sejak tanggal pembayaran di Bank dan Kantor Pos.
- Paspor dapat di alokasikan setelah permohonan melakukan pembayaran di bank atau Kantor pos yang telah terkoneksi dengan sistem Imigrasi.
- Percetakan dilakukan setelah alokasi paspor dan dinyatakan selesai setelah pemeriksaan terakhir oleh Kasi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian.
- Pengambilan DPRI dilakukan oleh pemohon langsung dengan terlebih dahulu mengambil nomor atrian.
- Petugas memanggil pemohon yang akan mengambil DPRI sesuai dengan nomor anterian yang tampil dilayar monitor petugas penyerahan paspor
- Penyerahan DPRI kepada pemohon setelah membubuhkan tanda tangan dan menyerahkan bukti pembayaran dari bank atau Kantor Pos.

#### **A. A.2.c Pelayanan Pemberian Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing**

- Pemohon Izin Tinggal warga Negara Asing datang langsung atau diwakili oleh biro jasa/penjamin untuk mengambil nomor antrian
- Setelah data di periksa dan di nyatakan lengkap petugas memanggil nomor antrian untuk melakukan pembayaran, dan setelah pembayaran petugas memanggil nomor anterian WNA untuk di foto dan wawancara dan penanda tangan ITAS dan dokumen lainnya.
- Petugas meneruskan ke Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk di adakan registrasi cegah tangkal
- Pada hari ketiga permohonan pengajuan / perpanjangan ITAS selesai.

#### A.2.d HASIL YANG DI CAPAI

Hasil kegiatan yang di peroleh sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan DPRI dan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai terselesaikan dengan tepat waktu.
2. Telah melaksanakan sistem antrian online (Apapo).
3. Telah disediakan layanan berbasis HAM (tersedia kursi roda, toilet khusus disabilitas, dan jalur masuk khusus disabilitas).
4. Telah disediakan ruang bermain anak.
5. Telah disediakan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas).
6. Telah disediakan makanan ringan dan minuman gratis bagi pemohon paspor.

#### Rekapitulasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)

BULAN	PASPOR RI 2 HAL	PASPOR RI 48 HAL	PENGGANTIAN	Penggantian Halaman Penuh	PENGGANTIAN KARENA HILANG	RUSAK
Januari	0	77	137	2	2	0
Februari	0	44	93	1	0	0
Maret	0	82	152	1	1	2
April	0	29	60	3	1	0
Mei	0	22	60	3	0	0
Juni	0	45	86	2	1	0
Juli	0	30	56	4	2	0
Agustus	0	37	47	3	1	0
September	0	33	78	2	2	0
Oktober	0	49	113	1	1	0
November	0	78	182	3	2	0
Desember	0	62	152	5	1	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>1216</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>2</b>

### Rekapitulasi Penolakan/Penundaan Penerbitan DPRI

BULAN	PENOLAKAN/PENUNDAAN PENERBITAN DPRI		
	JUMLAH	DIDUGA TKI NON PROSEDURAL	DITOLAK SISTEM/DUPLIKASI
Januari	5	5	-
Februari	2	2	-
Maret	5	5	-
April	7	5	2
Mei	1	1	-
Juni	1	1	-
Juli	2	1	1
Agustus	1	1	-
September	3	2	1
Oktober	1	1	-
November	1	1	-
Desember	3	3	-
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>4</b>

### Rekapitulasi Data Pengeluaran Dokumen Keimigrasian

BULAN	STIKER VISA VKSK	KITAP	KITAP ELEKTRONIK	SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN	KARTU AFFIDAFIT
Januari	9	0	0	0	0
Februari	2	0	0	0	0
Maret	47	0	0	0	0
April	18	0	0	0	0
Mei	10	0	0	0	0
Juni	10	0	0	0	0
Juli	10	0	0	0	0
Agustus	9	0	0	0	0
September	17	0	0	0	0
Oktober	19	0	0	0	0
November	24	0	0	0	0
Desember	23	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rekapitulasi Data Kedatangan dan Keberangkatan WNI/WNA di TPI**

Bulan	PENUNDAAN KEBERANGKATAN		PENOLAKAN KEBERANGKATAN		PENOLAKAN KEDATANGAN	
	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Rekapitulasi Tahunan Tanker dan Crew ABK Tahun 2021 Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai**

No	Bulan	Kapal Laut				ABK WNI				ABK WNA	
		Kargo Tangker		PELRA		Kargo Tangker		PELRA		Datang	Berangkat
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat		
1	Januari	127	121	29	29	418	405	178	217	2652	2393
2	Februari	131	124	121	34	280	235	121	209	2046	2086
3	Maret	163	159	297	50	316	285	297	298	3048	3268
4	April	160	155	205	33	348	250	205	193	2531	2482
5	Mei	161	164	259	39	363	351	259	260	3191	3223
6	Juni	135	131	263	49	324	263	263	278	2019	1999
7	Juli	165	169	313	53	315	307	313	309	2199	2611
8	Agustus	184	179	276	47	481	384	276	297	2956	2823
9	September	139	140	336	66	262	223	336	372	2672	2723
10	Oktober	139	141	301	58	295	209	301	371	2131	2215
11	November	145	148	326	63	353	334	326	338	2039	2159
12	Desember	144	140	318	62	362	391	318	329	2186	2463
	JUMLAH										

### **A.3 Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemantauan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi Keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi TIK mempunyai fungsi :

1. Melakukan pengumpulan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan Keimigrasian
2. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen Keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

Seksi TIK terdiri dari :

1. Sub Seksi Informasi Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai WNI dan WNA dalam rangka kerjasama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian.
2. Sub Seksi Komunikasi Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta penggunaan dan pemeliharaan sarana komunikasi

Data Rekapitulasi Kegiatan Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Tahun 2021

Bulan	Perpanjangan ITK Sosbud	Perpanjangan ITK Usaha	Pemberian KITAS Baru (1 thn)	Pemberian KITAS Baru (6 bln)	Pemberian Perpanjangan KITAS 1 tahun / kurang 6 bln	Alih Sponsor / Alih Jabatan	Tenaga Kerja Asing/ Isteri/ Anak / Orang Tua TKA	ERP Tidak Kembali / EPO KITAS	MERP	Dahsuskim Teraan Baru
Januari	0	0	5	0	3/0	0	0/1/3/0	1/7	8	0
Februari	0	0	1	0	2/0	0	1/0/0/0	2/3	3	0
Maret	0	0	1	0	6/0	0	0/1/2/0	2/1	42	35
April	0	0	1	1	3/10	0	12/1/1/0	0/2	14	0
Mei	1	0	0	1	2/0	0	0/0/0/0	2/8	3	5
Juni	0	0	0	5	3/1	0	0/0/0/0	0/1	9	0
Juli	0	0	0	0	9/0	0	0/0/0/0	4/2	9	0
Agustus	0	1	0	1	1/0	0	0/0/0/0	1/8	2	5
September	0	0	1	1	4/6	0	0/0/0/0	3/1	12	0
Oktober	1	0	0	0	8/0	0	0/0/0/0	1/2	8	8
November	1	0	7	0	7/4	0	0/0/0/0	1/8	18	1
Desember	4	0	11	0	5/2	0	0/2/3/0	6/4	18	0
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>54</b>

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Formilir A

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2006

Tanggal 29 November 2006

### Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021

#### I. Data Umum

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : 013. 408083 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai
2. Nomor Kode dan Nama Program : 013.06.10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
3. Indikator Hasil : - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah  
- Indeks Kepuasan Internal di Wilayah  
- Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah  
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah  
- Indeks Kepuasan Internal di Wilayah  
- Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
4. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : BF.5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah  
WA.6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
5. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan / Tahun ke : 1/1
6. Penanggungjawab Kegiatan : Rejeki Putra Ginting, S.H., M.Hum.
7. Tempat Kedudukan Penanggungjawab Kegiatan : Jl. Yos Sudarso no.02 Dumai
8. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA- 013.06.2.408083/2021

#### II. Data Keuangan Dan Indikator Keluaran Per Sub Bagian

Nomor Kode dan Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp. 000)	Indikator Keluaran (output)	Target (Volume)
----------------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------

	No. Loan	PHL N	Rupiah	Total Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
5254.AEA Koordinasi	-	-	Rp 122,780,000	Rp 73.498.551	1. Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan 2. Jumlah Pengawasan Keimigrasian 3. Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	2 LHK
5254.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat[	-	-	Rp 886,660,000	Rp 702.937.181	1. Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI yang Sesuai Ketentuan dari Permohonan 2. Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing 3. Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	16.153 Dokumen
5254.BHB Operasi Bidang Keamanan[	-	-	Rp 445.300.000	Rp 443.718.000	Jumlah laporan operasi bidang keamanan	32 LHK
5254.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat[			Rp 341.715.000	Rp 165.511.781	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	250.020 Orang
6232.EAA Layanan Perkantoran[	-	-	Rp 6.023.424.000	Rp 5.546.493.132	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
6232.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	-	Rp 221.420.000	Rp150.081.854	Jumlah perencanaan dan penganggaran internal	1 Layanan
6232.EAC Layanan Umum	-	-	Rp 319.765.000	Rp 290.364.057	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan
6232.EAD Layanan Sarana Internal	-	-	Rp 315.000.000	Rp 158.340.000	Jumlah Layanan Sarana Internal	22 Unit
6232.EAF Layanan SDM[	-	-	Rp 142.880.000	Rp 121.554.824	Jumlah Pegawai Dalam Layanan SDM	44 Pegawai
6232.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal[	-	-	Rp 55.420.000	Rp 43.707.790	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan
6232.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal[	-	-	Rp 113.600.000	Rp 0	Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Layanan

Nomor Kode dan Nama Sub Kegiatan	Anggaran		Target	Output	
	Pagu (Rp)	Total Realisasi (Rp)		Total Realisasi (Volume)	Total Progres (%)
1	2	3	4	5	6
5254.AEA Koordinasi	Rp 122,780,000	Rp 73.498.551	2 LHK	2 LHK	100
5254.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat[	Rp 886,660,000	Rp 702.937.181	16.153 Dokumen	16.153 Dokumen	80
5254.BHB Operasi Bidang Keamanan[	Rp 445.300.000	Rp 443.718.000	32 LHK	32 LHK	100
5254.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat[	Rp 341.715.000	Rp 165.511.781	250.020 Orang	200.000 Orang	75
6232.EAA Layanan Perkantoran[	Rp 4,855,339,000	Rp 4,781,914,187	1 Layanan	1 Layanan	100
6232.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Rp 221.420.000	Rp150.081.854	1 Layanan	1 Layanan	100
6232.EAC Layanan Umum	Rp 319.765.000	Rp 290.364.057	1 Layanan	1 Layanan	100
6232.EAD Layanan Sarana Internal	Rp 315.000.000	Rp 158.340.000	22 Unit	16 Unit	75
6232.EAF Layanan SDM[	Rp 142.880.000	Rp 121.554.824	44 Pegawai	44 Pegawai	100
6232.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal[	Rp 55.420.000	Rp 43.707.790	1 Layanan	1 Layanan	100
6232.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal[	Rp 113.600.000	Rp 0	1 Layanan	1 Layanan	100
<b>Total</b>	<b>Rp 7,870,339,000</b>	<b>Rp 6,931,628,225</b>			

## A. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021

### A.1. Rupiah Murni (RM)

JENIS BELANJA	PAGU	TARGET		REALISASI		SISA DANA
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
Belanja Pegawai	Rp3,049,146,000	Rp3,049,146,000	100 %	Rp 3,014,927,506	98.88%	Rp 34,218,494
Belanja Barang	Rp 1,806,193,000	Rp 1,806,193,000	100 %	Rp 1,766,986,681	97.83%	Rp 39,206,319
Belanja Modal	0	0	0	0	0	0
Jumlah	Rp4,855,339,000	Rp4,855,339,000	81,75%	Rp 4,781,914,187	98.49%	Rp 73,424,813

### A.2. Pendapatan Non Pajak (PNP)

JENIS BELANJA	PAGU	TARGET		REALISASI		SISA DANA
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
Belanja Pegawai	0	0	0	0		0
Belanja Barang	Rp 2,700,000,000	Rp 1.991.660.000	73,77%	1,991,374,038	73.75%	Rp 708,625,962
Belanja Modal	Rp 315,000,000	Rp 158.340.000	50,27%	158,340,000	50.27%	Rp 156,660,000
Jumlah	Rp 3,015,000,000	Rp 2.150.000.000	71.31%	2,149,714,038	71.30%	Rp 865,285,962

### A.3. RM + PNB

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA DANA
Belanja Pegawai	Rp 3,049,146,000	Rp 3,014,927,506	98.88%	Rp 34,218,494
Belanja Barang	Rp 4,506,193,000	Rp 3,758,360,719	83.40%	Rp 747,832,281
Belanja Modal	Rp 315,000,000	Rp 158,340,000	50.27%	Rp 156,660,000
Jumlah	Rp 7.524.443.000	Rp 6.110.880.325	88.07 %	Rp 1.413.562.675





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI**  
Jalan Yos Sudarso No.2 Dumai  
Telepon/Faksimili : (0765) 31280,4300377 / (0765) 438112  
Laman : [dumai.imigrasi.go.id](http://dumai.imigrasi.go.id) Surel : [kanimdmi@yahoo.co.id](mailto:kanimdmi@yahoo.co.id)

### PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	013-408083	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI	120	PAGU	3,049,146,000	4,506,193,000	315,000,000	0	0	0	0	0	0	7,870,339,000
				REALISASI	3,014,927,506	3,758,360,719	158,340,000							6,931,628,225
				PERSENTASE	(98.88%)	(83.40%)	(50.27%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(88.07%)
				SISA	34,218,494	747,832,281	156,660,000	0	0	0	0	0	938,710,775	
<b>TOTAL</b>					PAGU	3,049,146,000	4,506,193,000	315,000,000	0	0	0	0	0	7,870,339,000
					REALISASI	3,014,927,506	3,758,360,719	158,340,000						6,931,628,225
					PERSENTASE	(98.88%)	(83.40%)	(50.27%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(88.07%)
					SISA	34,218,494	747,832,281	156,660,000	0	0	0	0	0	938,710,775

### Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021



■ Pegawai ■ Barang ■ Modal



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI**  
Jalan Yos Sudarso No.2 Dumai  
Telepon/Faksimili : (0765) 31280,4300377 / (0765) 438112  
Laman : dumai.imigrasi.go.id Suren : [kanimdmi@yahoo.co.id](mailto:kanimdmi@yahoo.co.id)

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA
1	120	408083	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI	Nilai	100.00	78.02	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.47	100.00	100.00	100.00	0.00	85.00	93.07	95%	97.97	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5								
				Nilai Akhir	5.00	3.90	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	14.92	10.00	17.00	5.00	0.00	4.25								
				Nilai Aspek	92.67			100.00				99.67				85.00									

**Disclaimer:**

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

### C. CAPAIAN PRESTASI 2021



## BAB IV

### PENUTUP

Capaian kinerja dan penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021 yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai dalam rangka merealisasikan sasaran, program dan kegiatan sebagaimana dimuat dalam Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Dumai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 Nomor DIPA-013.06.2.408083/2021 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga(RKAKL) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai, adapun prosentase dan nominal capaian hasil pelaksanaannya adalah sebagai berikut;

#### Prosentase & Nominal Capaian Hasil Pelaksanaan

Pagu	Realisasi	Persentase%	Sisa
Rp 7,870,339,000	Rp 6,931,628,225	88.07%	Rp 938,710,775

Secara terinci dari pagu DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp 7,870,339,000 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)**, untuk **Semester II** persentase capaian **88.07%** , **nominalnya adalah Rp 6,931,628,225,- (enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)** dengan sisa dana anggaran Rp. **Rp 938,710,775 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)**, memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Terjadi penurunan realisasi dan capaian output, ini terjadi dikarenakan dampak Covid 19 dan tidak terealisasi semua anggaran PNPB dampak dari refocusing anggaran, sehingga terdapat batas anggaran yang dapat dibelanjakan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Keimigrasian. diharapkan LAKIP Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Bidang Keimigrasian guna peningkatan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Keimigrasian.

Dan pada saat ini Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai telah melaksanakan visi, misi serta fungsinya tepat pada sasaran. Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dapat diberikan tepat waktu dan sasaran. Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dapat diberikan tepat waktu dan sasaran. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai juga telah membuat program kerja, kalender dan

disbursement plan tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 yang berhubungan dengan kepegawaian dan tata usaha keuangan serta perlengkapan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Dalam hal pelayanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai telah dapat meningkatkan kinerja pelayanannya, hal ini tercermin dari pelaksanaan pelayanan DPRI dan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai terselesaikan dengan tepat waktu. Kantor Imigrasi juga telah melaksanakan sistem antrian online (Apapo), Layanan Aplikasi Pasporku, Layanan Larisa (Layanan Pengambilan Pasporku di hari Sabtu), Layanan Papadila (Layanan Pengantaran Pasporku Bagi Difabel dan Lansia), Layanan berbasis HAM, telah disediakan ruang bermain anak dan telah disediakan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), Inovasi Layanan seperti Layanan Pak Dilan (Pasporku Kolektif di Lokasi Anda), Layanan Pak Gambus (Siaga Memberi Layanan Khusus), Layanan Pantun (Pelayanan Tanpa Tunda), Layanan Saloka (Sampaikan Pasporku Ke Lokasi Anda), Layanan Drive Thru, dan Layanan Panggung Informasi

## **SARAN**

- Dengan banyaknya inovasi yang dibuat peran Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan dengan keterbatasan jumlah pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai, diperlukannya penambahan SDM agar semua inovasi layanan dapat berjalan dengan optimal.

## LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI AU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REJEKI PUTRA GINTING, SH, M.Hum  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PUJO HARINTO, Bc.I.P., S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai , 24 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Ham Riau

PUJO HARINTO, Bc.I.P., S.Sos., M.Si.  
NIP. 196703311990011001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Dumai

REJEKI PUTRA GINTING, SH. M.Hum  
NIP. 197502121998031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI DENGAN KEPALA KANTOR**  
**WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.796.455.000,-</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.796.455.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 5.503.646.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.503.646.000,-

Dumai, 24 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Ham Riau

PUJO HARINTO, Bc.I.P., S.Sos., M.Si.  
NIP. 196703311990011001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Dumai



REJEKI PUTRA GINTING, SH. M.Hum  
NIP. 197502121998031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REJEKI PUTRA GINTING, SH, M.Hum  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Dumai, 24 Maret 2021

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai



REJEKI PUTRA GINTING, SH. M.Hum  
NIP. 197502121998031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon : 021-5224658 Faksimille : 021-5225032  
Laman : [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id), Surel : [evalaprb.imigrasi@gmail.com](mailto:evalaprb.imigrasi@gmail.com)

Nomor : IMI.1-TI.07.01-001 05 Januari 2022  
Sifat : Amat Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Capaian  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian  
di seluruh Indonesia

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, bersama ini disampaikan nilai indeks capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagi Divisi Keimigrasian
  - a. Nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah** diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei IKM pada aplikasi Survey Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2021 dari seluruh satuan kerja yang ada di wilayah kerja Divisi Keimigrasian masing-masing;
  - b. Nilai **Indeks Kepuasan Internal (IKI) di Wilayah** diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei Integritas Internal Organisasi pada aplikasi Survei Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2021 dari seluruh satuan kerja pada aplikasi Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2021;
  - c. Nilai **Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah** diperoleh dari hasil survei pada aplikasi e survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Bagi Satuan Kerja Imigrasi
  - a. Nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah** diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei IKM Satuan kerja Imigrasi pada aplikasi Survey Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2021;
  - b. Nilai **Indeks Kepuasan Internal (IKI) di Wilayah** diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei Integritas Internal Organisasi pada aplikasi Survei Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2021 dari seluruh satuan kerja pada aplikasi Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2021;

- c. Nilai **Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah** menggunakan hasil survei yang sama dengan Divisi Keimigrasian di wilayah masing-masing.
3. Detail data nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Internal** dimaksud terlampir dan dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/RekapMI2021>

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Zaeroji  
NIP 196211011985031002

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. A r s i p-----.

A. DAFTAR RERATA NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN INTERNAL  
 SATUAN KERJA IMIGRASI TAHUN 2021

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH</b>	<b>3,86</b>	<b>2025</b>	<b>3,80</b>	<b>2254</b>
408040	KANIM KELAS II TPI LHOKEUMAWE	3,89	359	3,64	432
408573	KANIM KELAS I TPI BANDA ACEH	3,91	361	3,79	712
409026	KANIM KELAS II TPI LANGSA	3,88	365	3,83	353
409032	KANIM KELAS II NON TPI MEULABOH	3,77	310	3,82	144
627323	KANIM KELAS II TPI SABANG	3,89	269	3,94	338
683533	KANIM KELAS III NON TPI TAKENGON	3,84	361	3,87	275
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BALI</b>	<b>3,90</b>	<b>1723</b>	<b>3,87</b>	<b>6070</b>
408222	KANIM KELAS I TPI DENPASAR	3,88	335	3,82	1007
409108	KANIM KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI	3,88	545	3,86	3982
652408	KANIM KELAS II TPI SINGARAJA	3,97	449	3,98	447
664682	RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR	3,86	394	3,92	634
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN</b>	<b>3,92</b>	<b>1918</b>	<b>3,96</b>	<b>2023</b>
408938	KANIM KELAS II TPI CILEGON	3,96	393	3,96	447
613524	KANIM KELAS I NON TPI TANGERANG	3,90	1121	3,96	1182
652283	KANIM KELAS I NON TPI SERANG	3,95	404	3,97	394
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU</b>	<b>3,95</b>	<b>399</b>	<b>3,86</b>	<b>218</b>
409063	KANIM KELAS I TPI BENGKULU	3,95	399	3,86	218
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA</b>	<b>3,83</b>	<b>717</b>	<b>3,94</b>	<b>836</b>
407995	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA	3,83	717	3,94	836
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA</b>	<b>3,84</b>	<b>7932</b>	<b>3,82</b>	<b>4377</b>
109155	KANIM KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	3,80	1776	3,84	1582
407933	KANIM KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	3,83	773	3,95	340
407942	KANIM KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT	3,82	924	3,77	1236
408542	KANIM KELAS I TPI JAKARTA TIMUR	3,82	1132	3,95	4
408913	KANIM KELAS I TPI TANJUNG PRIOK	3,88	1250	3,81	141
408922	KANIM KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	3,88	890	0	0
652276	KANIM KELAS I TPI JAKARTA UTARA	3,85	782	3,83	437
664612	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	3,86	405	3,81	637
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM GORONTALO</b>	<b>3,88</b>	<b>281</b>	<b>3,87</b>	<b>321</b>
652429	KANIM KELAS I TPI GORONTALO	3,88	281	3,87	321
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAMBI</b>	<b>3,93</b>	<b>1219</b>	<b>3,93</b>	<b>1361</b>
109156	KANIM KELAS II NON TPI KUALA TUNGKAL	3,95	409	3,97	389
408134	KANIM KELAS I TPI JAMBI	3,96	355	3,95	596
418935	KANIM KELAS III NON TPI KERINCI	3,88	455	3,87	376
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT</b>	<b>3,96</b>	<b>4885</b>	<b>3,91</b>	<b>5178</b>

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
407958	KANIM KELAS I TPI BANDUNG	3,92	465	3,96	974
407964	KANIM KELAS II TPI CIREBON	3,98	974	3,98	724
408463	KANIM KELAS I NON TPI BOGOR	3,88	558	3,87	968
408627	KANIM KELAS III NON TPI CIANJUR	3,97	264	3,98	52
498382	KANIM KELAS II NON TPI DEPOK	3,97	600	3,96	507
652297	KANIM KELAS II NON TPI SUKABUMI	3,96	568	3,96	450
652302	KANIM KELAS II NON TPI KARAWANG	3,96	600	3,81	532
652319	KANIM KELAS II NON TPI TASIKMALAYA	3,95	430	3,98	408
683039	KANIM KELAS II NON TPI BEKASI	3,99	426	3,74	563
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH</b>	<b>3,90</b>	<b>4819</b>	<b>3,91</b>	<b>3998</b>
407973	KANIM KELAS I TPI SEMARANG	3,86	1157	3,97	880
407989	KANIM KELAS II TPI CILACAP	3,95	1267	3,82	542
408944	KANIM KELAS I TPI SURAKARTA	3,88	436	3,84	955
652323	KANIM KELAS II NON TPI PEMALANG	3,98	389	3,98	465
652340	KANIM KELAS II NON TPI WONOSOBO	3,85	632	3,97	395
652344	KANIM KELAS II NON TPI PATI	3,89	444	3,84	329
664629	RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	3,91	494	3,98	432
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR</b>	<b>3,91</b>	<b>7371</b>	<b>3,87</b>	<b>6735</b>
408009	KANIM KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	3,91	760	3,88	1784
408015	KANIM KELAS I TPI MALANG	3,83	979	3,96	972
408021	KANIM KELAS II TPI JEMBER	3,91	372	3,83	661
408953	KANIM KELAS I TPI TANJUNG PERAK	3,92	624	3,81	692
652365	KANIM KELAS II NON TPI MADIUN	3,96	2076	3,94	455
652372	KANIM KELAS II NON TPI BLITAR	3,97	658	3,81	470
664633	RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA	3,85	378	3,73	600
683458	KANIM KELAS III NON TPI PAMEKASAN	3,84	481	3,89	260
683462	KANIM KELAS III NON TPI KEDIRI	3,87	486	3,88	445
684006	KANIM KELAS III NON TPI PONOROGO	3,93	557	3,94	396
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN BARAT</b>	<b>3,90</b>	<b>3079</b>	<b>3,90</b>	<b>4052</b>
408171	KANIM KELAS I TPI PONTIANAK	3,91	459	3,94	904
408190	KANIM KELAS II NON TPI SINGKAWANG	3,95	444	3,96	440
409145	KANIM KELAS II TPI SANGGAU	3,84	340	3,93	384
418936	KANIM KELAS III NON TPI KETAPANG	3,89	768	3,76	311
539101	KANIM KELAS II TPI ENTIKONG	3,73	27	3,81	422
662967	KANIM KELAS II TPI SAMBAS	3,94	445	3,94	637
664650	RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK	3,90	445	3,90	725
686574	KANIM KELAS III NON TPI PUTUSSIBAU	3,82	151	3,78	229
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>3,87</b>	<b>807</b>	<b>3,74</b>	<b>998</b>
109158	KANIM KELAS II BATULICIN	3,89	359	3,73	354
408598	KANIM KELAS I TPI BANJARMASIN	3,86	448	3,75	644

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>3,90</b>	<b>820</b>	<b>3,81</b>	<b>784</b>
408448	KANIM KELAS I NON TPI PALANGKARAYA	3,88	366	3,83	373
409072	KANIM KELAS II TPI SAMPIT	3,91	454	3,79	411
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>3,92</b>	<b>2251</b>	<b>3,91</b>	<b>2842</b>
408196	KANIM KELAS I TPI BALIKPAPAN	3,90	529	3,98	686
408210	KANIM KELAS II TPI TARAkan	3,91	358	3,86	335
408479	KANIM KELAS I TPI SAMARINDA	3,94	377	3,80	562
409088	KANIM KELAS II TPI NUNUKAN	3,96	368	3,94	759
664654	RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN	3,91	416	3,91	393
679991	KANIM KELAS III NON TPI TANJUNG REDEB	3,85	203	3,85	107
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	<b>3,93</b>	<b>675</b>	<b>3,84</b>	<b>1017</b>
109160	KANIM KELAS II TPI TANJUNG PANDAN	3,98	323	3,91	373
408159	KANIM KELAS I TPI PANGKAL PINANG	3,89	352	3,81	644
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN RIAU</b>	<b>3,78</b>	<b>7400</b>	<b>3,90</b>	<b>6565</b>
109161	KANIM KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	3,90	536	3,82	211
408103	KANIM KELAS I TPI TANJUNG PINANG	3,97	852	3,97	731
408112	KANIM KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	3,96	450	3,93	372
408128	KANIM KELAS II TPI BELAKANG PADANG	3,94	593	3,98	359
408624	KANIM KELAS I KHUSUS TPI BATAM	3,99	3325	3,89	2851
409020	KANIM KELAS II TPI TAREMPA	3,94	395	3,99	237
409041	KANIM KELAS II TPI TANJUNG UBAN	3,89	417	3,93	495
409057	KANIM KELAS II TPI RANAI	3,89	402	3,89	239
677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	3,91	430	3,82	1070
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG</b>	<b>3,86</b>	<b>1245</b>	<b>3,91</b>	<b>1304</b>
109157	KANIM KELAS III NON TPI KALIANDA	3,83	392	3,85	224
408165	KANIM KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	3,80	495	3,90	836
683111	KANIM KELAS III NON TPI KOTABUMI	3,97	358	3,98	244
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU</b>	<b>3,85</b>	<b>650</b>	<b>3,77</b>	<b>1032</b>
408602	KANIM KELAS I TPI AMBON	3,82	334	3,68	586
662952	KANIM KELAS II TPI TUAL	3,88	316	3,88	446
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA</b>	<b>3,88</b>	<b>1303</b>	<b>3,90</b>	<b>759</b>
480505	KANIM KELAS I TPI TERNATE	3,82	351	3,89	364
662968	KANIM KELAS II NON TPI TOBELO	3,90	952	3,90	395
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM N T B</b>	<b>3,78</b>	<b>1451</b>	<b>3,75</b>	<b>1714</b>
408247	KANIM KELAS I TPI MATARAM	3,79	418	3,80	942
418938	KANIM KELAS III NON TPI BIMA	3,67	511	3,54	405
652412	KANIM KELAS II TPI SUMBAWA BESAR	3,88	522	3,86	367
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM N T T</b>	<b>3,81</b>	<b>1079</b>	<b>3,79</b>	<b>2679</b>
408231	KANIM KELAS I TPI KUPANG	3,86	346	3,93	569

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
409114	KANIM KELAS II TPI ATAMBUA	3,84	105	3,67	860
409123	KANIM KELAS II TPI MAUMERE	3,82	164	3,88	320
664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	3,81	319	3,81	714
683547	KANIM KELAS III TPI LABUAN BAJO	3,64	145	3,69	216
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA</b>	<b>3,79</b>	<b>1190</b>	<b>3,75</b>	<b>1843</b>
109159	KANIM KELAS II TPI TEMBAGAPURA	3,84	250	3,87	463
408253	KANIM KELAS I TPI JAYAPURA	3,79	299	3,64	368
408262	KANIM KELAS II TPI BIAK	3,74	337	3,61	351
408284	KANIM KELAS II TPI MERAUKE	3,90	177	3,87	454
664701	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	3,69	127	3,62	207
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT</b>	<b>3,88</b>	<b>718</b>	<b>3,85</b>	<b>817</b>
408278	KANIM KELAS II TPI SORONG	3,93	351	3,82	543
498398	KANIM KELAS II NON TPI MANOKWARI	3,84	367	3,90	274
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM RIAU</b>	<b>3,92</b>	<b>2935</b>	<b>3,91</b>	<b>3020</b>
408061	KANIM KELAS I TPI PEKANBARU	3,96	615	3,98	884
408077	KANIM KELAS II TPI BENGKALIS	3,90	198	3,84	303
408083	KANIM KELAS II TPI DUMAI	3,97	373	3,88	433
408092	KANIM KELAS II TPI BAGAN SIAPIAPI	3,99	405	4,00	231
408485	KANIM KELAS II TPI TEMBILAHAN	3,88	312	3,83	269
408511	KANIM KELAS II TPI SELAT PANJANG	3,80	306	3,75	144
664544	KANIM KELAS II TPI SIAK	3,94	319	3,95	223
664593	RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU	3,84	407	3,91	533
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI BARAT</b>	<b>3,83</b>	<b>460</b>	<b>3,64</b>	<b>373</b>
498402	KANIM KELAS II NON TPI POLEWALI MANDAR	3,85	375	3,70	280
498418	KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU	3,76	85	3,44	93
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN</b>	<b>3,87</b>	<b>1864</b>	<b>3,77</b>	<b>2466</b>
408216	KANIM KELAS I TPI MAKASSAR	3,94	671	3,79	1103
409001	KANIM KELAS II TPI PAREPARE	3,87	389	3,70	337
418937	KANIM KELAS III NON TPI PALOPO	3,86	400	3,68	343
664675	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	3,77	404	3,82	683
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGAH</b>	<b>3,87</b>	<b>753</b>	<b>3,83</b>	<b>959</b>
408423	KANIM KELAS I TPI PALU	3,84	438	3,81	688
686570	KANIM KELAS III NON TPI BANGGAI	3,91	315	3,88	271
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGGARA</b>	<b>3,90</b>	<b>1534</b>	<b>3,92</b>	<b>993</b>
409002	KANIM KELAS I TPI KENDARI	3,92	821	3,95	644
686549	KANIM KELAS III NON TPI WAKATOBI	3,88	338	3,93	103
686553	KANIM KELAS III NON TPI BAU BAU	3,89	375	3,85	246
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA</b>	<b>3,90</b>	<b>1426</b>	<b>3,84</b>	<b>1859</b>
408618	KANIM KELAS I TPI MANADO	3,91	442	3,83	743
409094	KANIM KELAS II TPI BITUNG	3,94	348	3,89	229



KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
664572	KANIM KELAS II TPI TAHUNA	3,90	126	3,94	240
664661	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	3,83	215	3,84	416
686532	KANIM KELAS III NON TPI KOTAMOBAGU	3,87	295	3,75	231
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT</b>	<b>3,82</b>	<b>1007</b>	<b>3,74</b>	<b>852</b>
408582	KANIM KELAS I TPI PADANG	3,81	600	3,72	472
652393	KANIM KELAS II NON TPI AGAM	3,85	407	3,77	380
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN</b>	<b>3,93</b>	<b>2217</b>	<b>3,90</b>	<b>1201</b>
408143	KANIM KELAS I TPI PALEMBANG	3,92	727	3,88	844
664565	KANIM KELAS II NON TPI MUARA ENIM	3,93	1490	3,95	357
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA</b>	<b>3,94</b>	<b>4368</b>	<b>3,92</b>	<b>5252</b>
408046	KANIM KELAS I KHUSUS TPI MEDAN	3,92	1298	3,88	2527
408052	KANIM KELAS II NON TPI PEMATANG SIANTAR	3,97	357	3,99	494
408491	KANIM KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAN	3,96	580	3,97	414
408969	KANIM KELAS I TPI POLONIA	3,95	951	3,94	559
408975	KANIM KELAS II TPI BELAWAN	3,92	437	3,94	355
408981	KANIM KELAS II TPI SIBOLGA	3,97	365	3,96	358
664586	RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN	3,94	380	3,97	545

## B. DAFTAR NILAI INDEKS PENGAMANAN KEIMIGRASIAN (IPK) TAHUN 2021

NO	WILAYAH	PERSENTASI PENGISIAN (PARTICIPANT RATE)	NILAI INDEKS YANG DICAPAI	GRADE*
1	ACEH	100,00	3,82	A
2	SUMATERA UTARA	90,91	4	A
3	KEP. RIAU	95,00	3,68	A
4	RIAU	87,50	3,98	A
5	SUMATERA BARAT	80,00	3,82	A
6	JAMBI	100,00	3,91	A
7	BENGKULU	100,00	3,85	A
8	SUMATERA SELATAN	50,00	3,89	A
9	LAMPUNG	87,50	3,91	A
10	BANGKA BELITUNG	100,00	3,91	A
11	BANTEN	71,43	4,00	A
12	DKI JAKARTA	86,67	3,81	A
13	JAWA BARAT	94,12	3,94	A
14	JAWA TENGAH	93,33	3,86	A
15	YOGYAKARTA	100,00	3,89	A
16	JAWA TIMUR	57,14	3,99	A
17	BALI	88,89	3,94	A
18	NTB	62,50	4,00	A
19	NTT	92,86	3,84	A
20	GORONTALO	60,00	4,00	A
21	KALIMANTAN BARAT	65,00	3,85	A
22	KALIMANTAN TENGAH	75,00	3,83	A
23	KALIMANTAN SELATAN	71,43	3,91	A
24	KALIMANTAN TIMUR	56,25	3,81	A
25	SULAWESI SELATAN	66,67	3,80	A
26	SULAWESI BARAT	100,00	3,83	A
27	SULAWESI TENGAH	60,00	3,73	A
28	SULAWESI TENGGARA	40,00	3,52	B
29	SULAWESI UTARA	100,00	3,92	A
30	MALUKU UTARA	100,00	3,96	A
31	MALUKU	85,71	3,61	A
32	PAPUA	93,33	3,71	A
33	PAPUA BARAT	85,71	3,66	A

Grade*	Keterangan	Indeks
A	Sangat Baik	3,61 – 4,00
B	Baik	3,11 – 3,60
C	Kurang Baik	2,61 – 3,10
D	Tidak Baik	1,00 – 2,60



a.n. Direktur Jenderal Imigrasi  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Zaeroji  
NIP 19621101198503100



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA
1	120	408083	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI	Nilai	100.00	78.02	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.47	100.00	100.00	100.00	0.00	85.00	93.07	95%	97.97					
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5								
				Nilai Akhir	5.00	3.90	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	14.92	10.00	17.00	5.00	0.00	4.25								
				Nilai Aspek	92.67			100.00				99.87				85.00									

**Disclaimer:**

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output